



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk jangka waktu satu tahun, diperlukan peta jabatan yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk setiap jenjang jabatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam penataan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2021.

KETIGA : Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEEMPAT : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan 5 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓



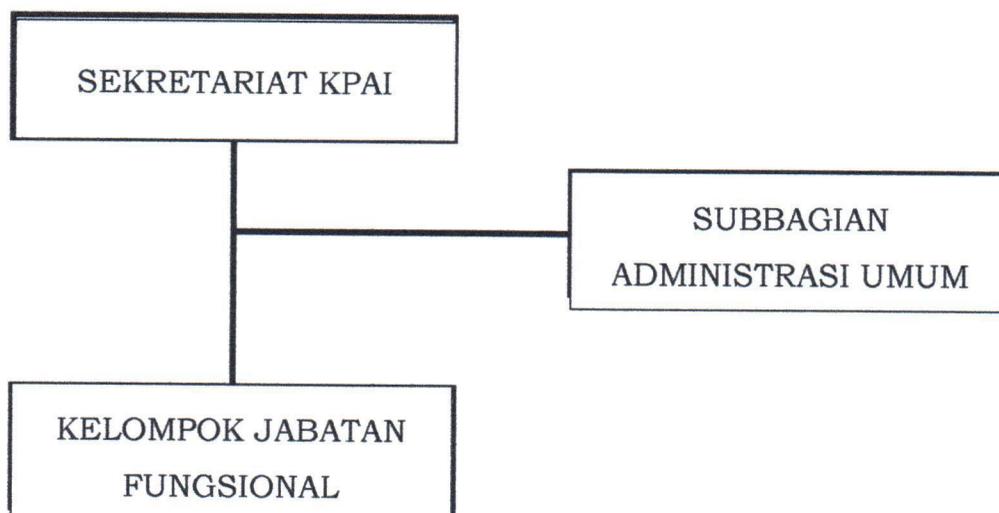


MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2021
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

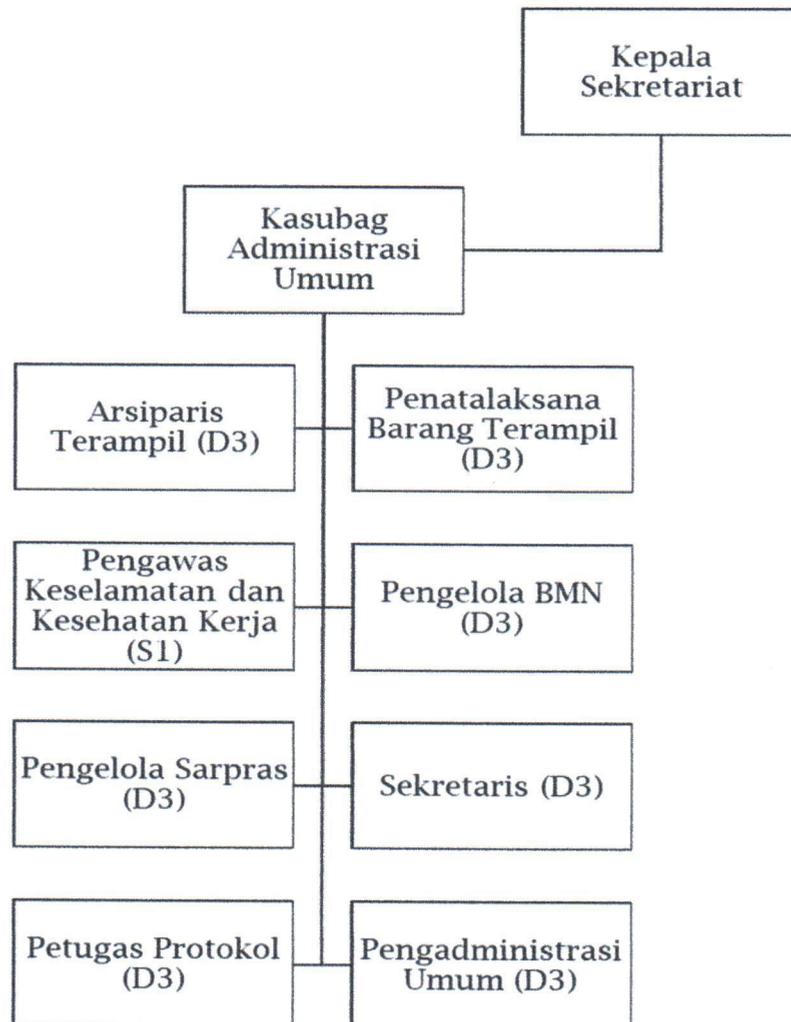




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

I. PETA JABATAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

1.1. PETA JABATAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Kasubag Administrasi Umum	10	1	0	0	0	-1	0	
2	Arsiparis Pertama	8	0	3	0	0	0	-3	
3	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7	0	0	0	0	0	0	
4	Penatalaksana Barang Terampil	6	0	0	0	0	0	0	
5	Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja	7	0	0	0	0	0	0	
6	Pengelola BMN	6	0	0	0	0	0	0	
7	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	0	0	0	0	0	0	
8	Sekretaris	6	0	0	0	0	0	0	
9	Petugas Protokol	6	0	0	0	0	0	0	
10	Pengadministrasi Umum	6	0	0	0	0	0	0	
Total Pegawai			1	3	0	0	-1	-3	
			4		0		-4		

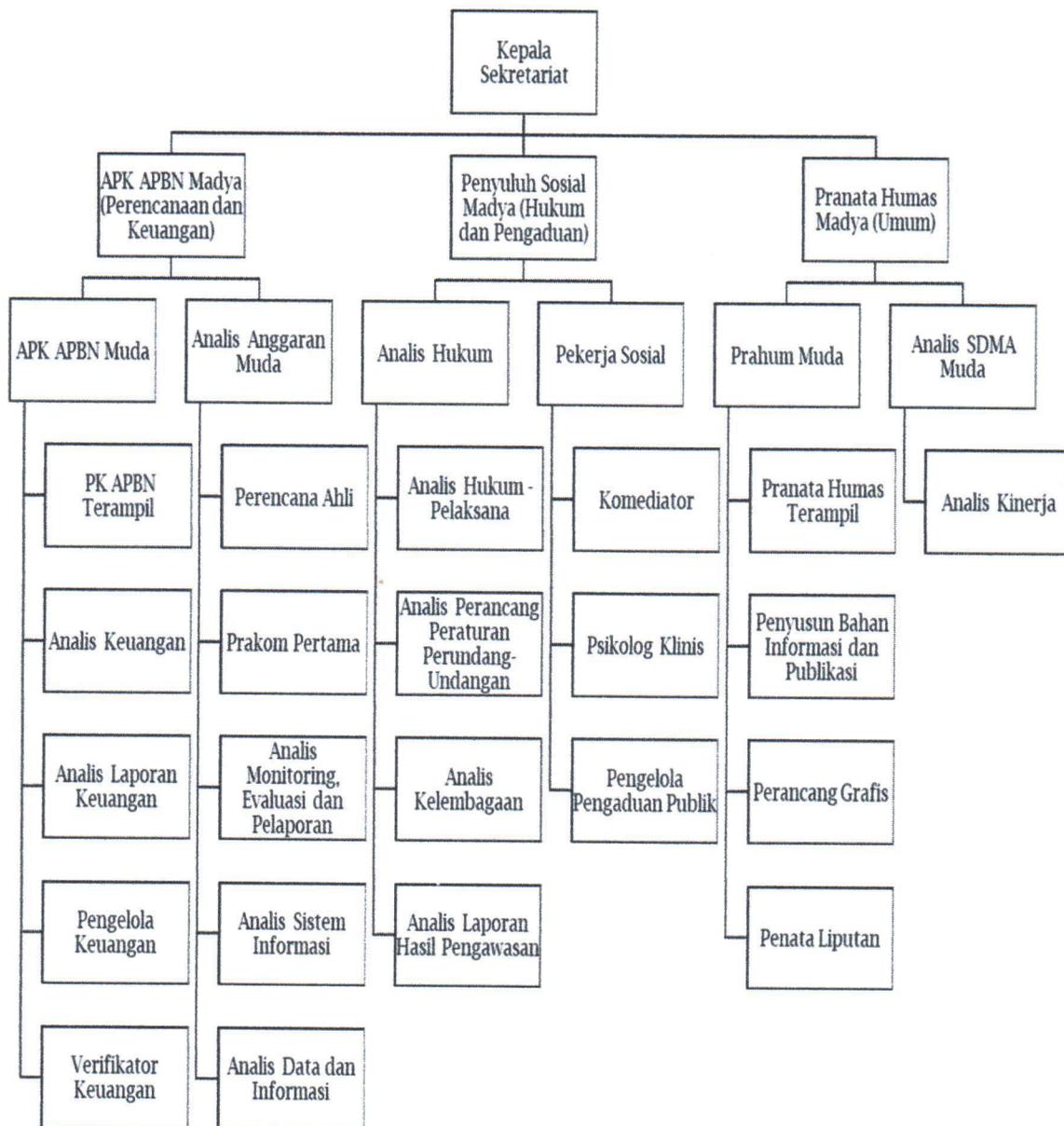




MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

II. PETA JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

2.1. PETA JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	ABK		Bezetting		Kebutuhan		KET
			PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	
1	Kepala Sekretariat	14	1	0	1	0	0	0	
2	Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya (Koordinator)	13	1	0	1	0	0	0	
3	Analisis Pengelola Keuangan APBN Madya	12	0	0	0	0	0	0	
4	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda (Sub Koordinator)	10	1	0	1	0	0	0	
5	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	10	0	0	0	0	0	0	
6	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	8	0	1	0	0	0	-1	
7	Analisis Anggaran Muda (Sub Koordinator)	10	1	0	1	0	0	0	
8	Analisis Anggaran Muda	10	0	0	0	0	0	0	
9	Analisis Anggaran Pertama	8	0	3	0	0	0	-3	
10	Perencana Muda	9	0	0	0	0	0	0	
11	Perencana Pertama	8	0	1	0	0	0	-1	
12	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9	0	0	0	0	0	0	
13	Pranata Keuangan APBN Mahir	8	0	0	0	0	0	0	
14	Pranata Keuangan APBN Terampil	7	4	2	1	0	-3	-2	
15	Pranata Komputer	9	1	0	0	0	-1	0	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

	Muda								
16	Pranata Komputer Pertama	8	1	1	1	0	0	-1	
17	Pranata Komputer Penyelia	8	0	0	0	0	0	0	
18	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7	0	0	0	0	0	0	
19	Pranata Komputer Terampil	6	0	0	0	0	0	0	
20	Analisis Keuangan	7	0	0	0	0	0	0	
21	Analisis Laporan Keuangan	7	0	0	0	0	0	0	
22	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	7	0	0	0	0	0	0	
23	Pengelola Keuangan	6	0	0	0	0	0	0	
24	Analisis Sistem Informasi	7	0	0	0	0	0	0	
25	Analisis data dan Informasi	7	0	0	0	0	0	0	
26	Verifikator Keuangan	6	0	0	0	0	0	0	
27	Penyuluh Sosial Madya (Koordinator)	13	1	0	1	0	0	0	
28	Analisis Hukum Madya	12	0	0	0	0	0	0	
29	Analisis Hukum Muda	10	0	0	0	0	0	0	
30	Analisis Hukum Pertama	8	0	11	0	0	0	-11	
31	Pekerja Sosial Madya	11	0	0	0	0	0	0	
32	Pekerja Sosial Muda	9	0	0	0	0	0	0	
33	Pekerja Sosial Pertama	8	0	4	0	0	0	-4	
34	Analisis Hukum Pelaksana	8	0	0	0	0	0	0	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

35	Pranata Humas Madya (Koordinator)	13	1	0	1	0	0	0	
36	Pranata Humas Muda (Subkoordinator)	10	1	0	1	0	0	0	
37	Pranata Humas Muda	10	0	0	0	0	0	0	
38	Pranata Humas Pertama	8	0	4	0	0	0	-4	
39	Analisis Kepegawaian Muda (Sub Koordinator)	10	1	0	1	0	0	0	
40	Analisis Kepegawaian Muda	9	1	0	0	0	-1	0	
41	Analisis Kepegawaian Pertama	8	0	2	0	0	0	-2	
Total Pegawai			15	29	10	0	5	29	
			44		10		34		

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

